

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Praktik-praktik manajemen laba dapat dilihat pada kasus Enron Corporation di Amerika Serikat (Isnaeni, 2015) yang memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan mencatat keuntungan 600 juta dollar AS yang kenyataannya perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian. Manipulasi ini terjadi karena keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.

Di Indonesia kasus serupa yang dinyatakan dalam *annual report* Bapepam 2002 (www.bapepam.go.id) yang melakukan penggelembungan keuntungan ditemukan pada PT Kimia Farma perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang melakukan rekayasa pencatatan sehingga berdampak pada naiknya jumlah laba bersih. Kasus lainnya yakni pada PT Ades Alfindo yang ditemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan, yang hasil penelusurannya menunjukkan penjualan riil lebih rendah dari yang dilaporkan, dan PT Perusahaan Gas Negara yang menunda publikasi informasi material atas penurunan

volume gas hingga memberikan informasi yang menyesatkan bagi para investor.

Kasus-kasus yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa metode dan standar akuntansi yang berlaku selama ini ternyata masih belum bisa membatasi tindakan oportunis pihak manajemen, yaitu mencari keuntungan pribadi. Akhirnya angka laba yang tertera dalam laporan keuangan tidak sebagaimana adanya dan menyesatkan keputusan para investor. Maka dari itu dibutuhkan metode dan standar akuntansi yang dapat meminimalisir atau mencegah praktik manajemen laba.

Isnaeni (2015) mendefinisikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia diterbitkan oleh DSAK-IAI yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelum diterbitkannya IFRS (*International Financial Reporting Standards*), standar akuntansi keuangan dahulunya berkiblat pada US GAAP. Perubahan kiblat ini dilakukan karena kebutuhan persaingan setiap perusahaan yang masuk dalam perdagangan global dalam menarik calon investor maupun kreditor. Sejak tahun 1994 IAI telah melaksanakan program harmonisasi dan adopsi standar akuntansi internasional dalam rangka pengembangan standar akuntansinya, hingga di tahun 2008 mengumumkan rencana konvergensi IFRS.

Salah satu ciri-ciri dari IFRS adalah adanya pelaporan menggunakan *fair value* dimana perusahaan akan melaporkan aset dan kewajibannya sejumlah nilai wajarnya. IFRS juga merubah paradigma standar akuntansi US GAAP yang tadinya *rule based* menjadi *principle based*. Implikasinya lebih banyak estimasi dan *judgement* yang akan dilakukan terkait laporan keuangan.

Perubahan PSAK dari yang berbasis aturan (*rule based*) menjadi berbasis prinsip (*principle based*) menimbulkan beberapa perbedaan mendasar pada perlakuan akuntansi. Menurut *Securities and Exchange Commission – SEC* (2003) dalam Bangun (2014), karakteristik utama dari standar berbasis aturan adalah adanya batasan yang jelas (*bright lines*) yang mengarah pada petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang sangat rinci. *Bright lines* dalam hal ini dapat berupa batasan kuantitatif yang harus dipenuhi sebagai syarat terpenuhinya suatu aturan.

Standar dengan *principle based* tidak memberi ketentuan yang spesifik tetapi menekankan pada sejumlah penilaian yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau lebih dikenal dengan *professional judgement*. Schipper (2003) berpendapat bahwa kurangnya spesifikasi pada suatu standar dapat menimbulkan volatilitas terhadap angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Standar dengan *principle based* menyebabkan suatu penilaian dilakukan secara tidak konsisten sehingga memungkinkan lebih besarnya peluang untuk melakukan manajemen laba.

Konservatisme, atau lebih dikenal dengan istilah *prudence*, merupakan prinsip unik yang dihasilkan dari konvensi akuntansi. Menurut Suwardjono (2010), konservatisme (*prudence*) adalah “sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut”. Sebagian akuntan beranggapan bahwa konservatisme (*prudence*) merupakan prinsip yang wajib dianut dalam penyusunan laporan keuangan agar manajemen yang pada umumnya terlalu optimis dalam menghadapi ketidakpastian dapat mengendalikan sifatnya tersebut (Gunawan, 2015).

Dampak dari konsep *prudence* justru membuat laporan keuangan menjadi tidak relevan dan *reliable* karena pada dasarnya prinsip *prudence* akan mengakui rugi lebih cepat dan mengakui laba lebih lambat. Hal tersebut akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dalam hal lain, prinsip *prudence* yang dilakukan oleh manajemen akan mempengaruhi jumlah laba yang diinformasikan dalam laporan keuangan. Laba tersebut akan menjadi salah satu acuan atau dasar yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

Akan tetapi, disisi lain prinsip *prudence* juga dianggap diperlukan oleh manajemen karena memiliki beberapa kelebihan. Pertama, *overstatement* laba perusahaan akan lebih berisiko daripada *understatement* laba perusahaan. Hal itu dikarenakan terdapat

konsekuensi kerugian atau kebangkrutan yang akan terjadi apabila manajemen perusahaan melakukan *overstatement* laba perusahaan. Kedua, adanya sikap kehati-hatian dari manajemen untuk menentukan estimasi metode-metode penilaian yang digunakan baik itu dalam penilaian aktiva, persediaan, maupun, kerugian piutang.

Menurut Rahman, dkk (2013) salah satu motivasi manajemen laba adalah meminimalkan pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Oleh karena itu, manajemen melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak cenderung memilih cara aman dengan menghindari pajak secara legal, yaitu melakukan *tax avoidance*. Tsabat (2015) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar aturan atau standar yang berlaku. Namun, *tax avoidance* dapat memberi kerugian besar bagi negara karena mengurangi pemasukkan APBN. Jadi, dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan legal yang merugikan pemerintah.

Adanya konvergensi IFRS di Indonesia tersebut mengakibatkan adanya perubahan pengukuran dan penilaian baik aset maupun liabilitas dimana aset maupun liabilitas akan dinilai atau diukur dengan menggunakan *fair value* atau nilai wajar. Keunggulan dari akuntansi yang menggunakan nilai wajar bahwa suatu pengukuran dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi saat itu sehingga menjadi lebih relevan. Namun, kelemahannya adalah sulitnya menentukan nilai wajar pada aset

atau liabilitas yang tidak aktif diperdagangkan. Hal ini mengakibatkan suatu aset maupun liabilitas ditentukan nilai wajarnya melalui estimasi atau asumsi pihak penilai (*appraisal*) yang bersifat subjektif. Subjektivitas dalam melakukan penilaian menyebabkan dampak yang berbeda dalam laba rugi dan lebih besarnya volatilitas laba. Hal ini dikarenakan suatu penilaian tidak didasarkan pada ketentuan pasti sehingga memungkinkan manajemen laba yang lebih besar.

Standar yang mengadopsi IFRS mensyaratkan melakukan pengungkapan yang lebih banyak, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pengungkapan yang lebih luas dapat meningkatkan transparansi pada laporan keuangan sehingga memberi kemungkinan yang lebih kecil bagi perusahaan untuk merekayasa laporan keuangan dan melakukan praktik manajemen laba.

Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Perilaku manajemen sendiri dapat dijelaskan melalui hipotesis dalam *positive accounting theory* yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986). Hipotesis yang mempengaruhi manajemen laba tersebut adalah *bonus plan hypothesis*, dimana bahwa perusahaan

dengan bonus yang sudah direncanakan akan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan *income* dengan metode ini, kemudian *debt to equity hypothesis* yaitu menyatakan bahwa perusahaan mempunyai rasio *debt to equity* yang besar maka manajer perusahaan akan menerapkan metode ini terhadap perusahaannya, dan yang terakhir adalah *political cost hypothesis* yaitu untuk perusahaan yang besar dimana kegiatan operasinya hampir dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat luas maka perusahaan akan cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan.

Sekarang setelah adanya konvergensi IFRS, ada yang menganggap bahwa prinsip ini telah berkurang bahkan hilang dan ada juga yang menganggap bahwa *prudence* masih ada bahkan meningkat levelnya dalam laporan keuangan. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa konservatisme (*prudence*) justru berpengaruh positif setelah adanya konvergensi IFRS ((Suprianto dan Dewi (2014), Afdalika (2015), dan Gunawan (2015)). Penelitian Soraya (2014), Pricilia (2014), dan Molenaar (2010) menemukan bahwa konservatisme (*prudence*) berpengaruh secara negatif setelah adanya konvergensi IFRS. Akan tetapi, ada pula penelitian yang menyatakan konservatisme (*prudence*) tidak berpengaruh setelah adanya konvergensi IFRS (Gafa, 2015). Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh konvergensi IFRS terhadap *prudence*. Dengan kata lain, bahwa adanya konvergensi IFRS belum tentu akan menurunkan tingkat *prudence* laporan keuangan.

Penelitian yang membandingkan tingkat *tax avoidance* terhadap manajemen laba sebelum dan setelah adanya konvergensi IFRS, sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Rahman, dkk (2013), Wijaya dan Christiawan (2014), Yuliana (2011) mampu membuktikan hubungan positif antara *tax avoidance* dan manajemen laba. Larastomo, dkk (2016), Dewi dan Ulupui (2014) menemukan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian lain yang dilakukan Putri (2014) dan Tanomi (2012) menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pada masalah tingkat *prudence* ini sangat menarik untuk diteliti karena dengan adanya konvergensi IFRS, pengukuran atau penilaian elemen-elemen laporan keuangan menggunakan *professional judgment* dimana penilaiannya lebih optimis karena perusahaan dapat mengakui perubahan nilai suatu akun sesuai dengan nilai wajar. Menurut Gunawan (2015), ketika perusahaan berada dalam situasi dimana terdapat ketidakpastian yang tinggi, maka perusahaan akan cenderung tidak optimis atau lebih konservatif. Dengan demikian, konservatisme (*prudence*) dalam IFRS bersifat kondisional. Walaupun dalam konvergensi IFRS diperkenalkan prinsip baru, yaitu *prudence*, namun konservatisme tetap dipergunakan karena *prudence* juga merupakan konsep kehati-hatian yang didalamnya masih terkandung unsur konservatisme.

Terdapat dugaan bahwa *prudence* digunakan dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan khususnya dalam keputusan manajemen laba. Terdapat dugaan juga bahwa manajer perusahaan memilih *prudence* dengan dipengaruhi oleh perilaku oportunistik manajer dalam manajemen laba agar dapat memaksimalkan kepentingannya.

Adanya inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama. Penelitian ini ingin menjelaskan kondisi sebelum dan setelah penerapan IFRS dengan menggunakan variabel *prudence* dan *tax avoidance* perbedaan pengaruhnya terhadap manajemen laba.

Tax avoidance juga menarik untuk diteliti karena sering terjadi di Indonesia. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Putri (2014), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Penelitian sekarang menggunakan objek perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods*. Perusahaan manufaktur yang memiliki aset tetap yang besar dipandang peneliti dapat menjadi celah dilakukannya manajemen laba melalui praktik *prudence* dan *tax avoidance*.

Dari segi periode, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode 2008-2015. Periode tersebut dipilih karena penerapan IFRS telah resmi dimulai pada Desember 2008 oleh IAI (Gunawan, 2015), sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan masih menerapkan SAK berdasarkan GAAP pada periode sebelum 2008. Karenanya periode sebelum penerapan yang dipilih adalah tahun 2008-2011. Sedangkan penerapan secara penuh terjadi pada 1 Januari 2012, sehingga dapat dipastikan bahwa setelah 1 Januari 2012 perusahaan sudah menerapkan SAK konvergensi IFRS. Karenanya periode setelah penerapan yang dipilih adalah tahun 2012-2015.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Perbedaan *Prudence* dan *Tax Avoidance* Sebelum dan Setelah Penerapan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* Terhadap Manajemen Laba**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Secara garis besar permasalahan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan standar akuntansi atas konvergensi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS) belum dapat membatasi manajemen laba dalam perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan *go public* yang ada di Indonesia.
 2. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga tidak dapat menolak untuk menerapkan IFRS, karena penggunaan prinsip ini sangat berpengaruh dalam hubungan bisnis antar perusahaan baik secara regional, nasional, maupun internasional. Hal ini membuat manajemen dalam setiap perusahaan tersebut memiliki keinginan untuk memanipulasi informasi keuangan perusahaan dalam laporan keuangannya.
 3. Banyak perusahaan manufaktur melakukan manajemen laba selama periode penelitian. Praktik seperti ini akan berimplikasi pada hilangnya kredibilitas laporan keuangan, menambah bias informasi dalam laporan keuangan, sehingga mengganggu pengguna laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut.
- Salah satu contoh dalam pentingnya informasi laba yang diterbitkan oleh suatu perusahaan adalah dari kasus PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Terjadi penilaian kinerja dibawah ekspektasi pelaku pasar yang mengakibatkan menurunnya harga saham.

4. Banyak terjadi *prudence*, akibat adanya kewenangan manajer yang begitu besar untuk menggunakan *judgement* dalam mengestimasi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan insentif dan meningkatkan *moral hazard* manajemen.
5. Lebih luasnya penggunaan nilai wajar dan pengungkapan setelah penerapan IFRS ke dalam PSAK dapat menimbulkan perbedaan kualitas laba dibandingkan dengan sebelum penerapan IFRS.
6. Ketatnya regulasi pajak dan peraturan akuntansi yang semakin disiplin masih memberikan celah bagi perusahaan melakukan upaya-upaya untuk menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan dan biaya, sehingga dapat menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).
7. Praktik *aggressive tax avoidance* yang masih pada *grey area*, menjadikan suatu pilihan strategi menarik yang diambil manajemen, ada berbagai motif dalam praktik *aggressive tax avoidance*, salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan profitabilitas melalui penurunan beban pajak perusahaan.
8. Laba merupakan dasar perhitungan kewajiban pajak, semakin tinggi laba yang diperoleh akan menghasilkan kewajiban pajak yang semakin tinggi juga. Kondisi tersebut memotivasi manajer mengelola laba secara oportunistik atau memanipulasinya untuk mencapai tingkat laba tertentu atau melakukan manajemen laba.

9. Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi.
10. Praktik *tax avoidance* dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan, karena dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

1.3. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian tidak melebar serta tercapainya suatu hasil pembahasan yang lebih rinci dan terarah, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen *prudence* dan *tax avoidance*.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba.
3. Periode penelitian yang dilakukan 4 tahun sebelum dan 4 tahun setelah penerapan IFRS yaitu dari tahun 2008-2015.
4. Data sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods*.

5. Tempat penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan *prudence* sebelum dan setelah penerapan IFRS pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015?
2. Apakah terdapat perbedaan *tax avoidance* sebelum dan setelah penerapan IFRS pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015?
3. Apakah terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan setelah penerapan IFRS pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015?
4. Apakah terdapat pengaruh negatif *prudence* sebelum dan setelah penerapan IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015?
5. Apakah terdapat pengaruh positif *tax avoidance* sebelum dan setelah penerapan IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015?

6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh *prudence* dan *tax avoidance* sebelum dan setelah penerapan IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan *prudence* sebelum dan setelah penerapan IFRS pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015.
2. Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan *tax avoidance* sebelum dan setelah penerapan IFRS pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015.
3. Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan setelah penerapan IFRS pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015.
4. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh negatif *prudence* sebelum dan setelah penerapan IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015.

5. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh positif *tax avoidance* sebelum dan setelah penerapan IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015.
6. Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan pengaruh *prudence* dan *tax avoidance* sebelum dan setelah penerapan IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur kelompok industri *consumer goods* yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2015.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dibidang akuntansi dalam pengembangan penelitian mengenai bagaimana perbedaan pengaruh penerapan IFRS, manajemen laba terhadap *prudence* dan *tax avoidance*. Dimana konvergensi IFRS ini memiliki dampak yaitu adanya peningkatan penggunaan nilai wajar (*fair value*) dan adanya peningkatan penggunaan “*judgement*” oleh pembuat laporan keuangan karena karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip (*principle based*). Basis ini mengandung makna bahwa standar akuntansi tidak bersifat ketat, melainkan hanya memberikan prinsip-prinsip umum standar akuntansi yang harus diikuti untuk memastikan pencapaian kualitas informasi dalam

laporan keuangan bersifat relevan, dapat diperbandingkan, dan objektif.

2. Manfaat Praktis

Praktik perekayasaan laporan keuangan melalui manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan seorang manajer dalam menerapkan teknik-teknik untuk dapat menaikkan atau menurunkan laba perusahaannya. Terdapat beberapa hal yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba menurut Scott (2000), yaitu motivasi rencana bonus, kontrak utang jangka panjang, motivasi perpajakan, penawaran saham perdana, penawaran obligasi perdana, dan motivasi politik.

Penelitian ini didasari atas motivasi politik dalam memotivasi pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Sehingga manfaat praktis hasil penelitian ini yaitu:

- a. Memberikan masukan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengenai penerapan PSAK konvergensi IFRS terhadap *prudence*.
- b. Memberikan bukti bagi perusahaan bahwa penerapan PSAK konvergensi IFRS berdampak pada tingkat *prudence* dan *tax avoidance*, sehingga perusahaan dapat menentukan bagaimana penerapan *prudence* dan *tax avoidance* dalam laporan keuangannya.